

# MELEPAS PERBEDAAN, MENEMUKAN PERSATUAN RAKYAT PEKERJA DALAM ANCAMAN KRISIS

## Analisis Kelas terhadap Dinamika Perjuangan Kelas Buruh dan Rakyat Pekerja

Dominggus Octavianus<sup>1</sup>

### Abstract

*Economic liberation in the slogan of "globalization" has evolved the social impacts felt directly by the levels of society. The political reaction representing the levels' interests have become the inevitable consequences. Unfortunately, such political reactions are still intermittent, undirected, and have even created horizontal conflicts. From the class perspective, the contradiction between different classes is an objective law derived from the different demands and interests of a society. The contradiction between labor and working people is of no exception as well. The reality, however, has shown that such contradictions are not principal, and are just the impacts of more fundamental situations. On the contrary, the interest similarities can be found in such social levels in order to run the mutual struggle, mainly as a unity of identity called working people.*

### Pendahuluan

Tekanan besar dari arus krisis ekonomi global sejak pertengahan 1997 berimbas pada hampir semua lapisan masyarakat, terutama pada lapisan bawah. Di satu sisi, situasi ini menghasilkan ekspresi politik yang

variatif, bahkan saling berkontradiksi, antara unsur-unsur dalam masyarakat. Tetapi di sisi lain, ekspresi politik yang berbeda tersebut dapat mencari muara bersama bagi perubahan kondisi yang mereka butuhkan.

---

<sup>1</sup> Staf Redaksi Tabloid *Pembebasan*. Sebelumnya bekerja pada Departemen Pendidikan dan Propaganda Pengurus Pusat Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (PP FNPBI).

Dampak awal dari kebangkrutan industri adalah individu-individu yang kehilangan pekerjaan. Karena kasusnya yang begitu luas dan massal, hal ini tidak dapat lagi disebut fenomena. Selain itu, perpindahan penduduk dari pedesaan juga terus bertambah sejak produksi pertanian merosot, karena kehilangan kemampuan produksi dan tercaploknya pasar oleh komoditas pertanian impor. Bekerja pada sektor pertanian cenderung lebih merugikan, terutama bagi pertanian kecil yang lemah dalam permodalan. Mereka memilih keluar dari cara produksi lama dan mencari bentuk kerja yang lain di perkotaan, atau tetap di desa namun tidak sebagai produsen komoditas pertanian. Setelah meninggalkan cara produksi lama,<sup>2</sup> mereka kemudian terbagi ke dalam tiga pilihan, yakni masuk ke sektor industri dan menjadi buruh upahan, terutama pada industri berbasis teknologi rendah; menjadi tenaga kerja migran dengan kemampuan terbatas; atau masuk ke sektor informal atau menjadi pengangguran. Dalam sektor informal ini tiga asal-

usul kelas bertemu, yakni: 1) kelas buruh yang tergusur dari tempat kerjanya; 2) borjuis kecil dan semi proletariat desa yang memilih berpindah pekerjaan; dan 3) kelas borjuis kecil yang baru lepas dari asal-usul kelasnya dalam lingkungan keluarga dan menuju pasar tenaga kerja sebagai angkatan kerja baru.

Menarik realitas ini ke dalam kesimpulan teoretis, dapat dikatakan bahwa perkembangan situasi ekonomi-politik nasional dan internasional (krisis ekonomi) telah menghasilkan: 1) pola kerja dan hubungan sosial baru — meski tidak fundamental, yang pada situasi sebelumnya tidak tampak mencolok; 2) perubahan kuantitatif pada komposisi kelas-kelas sosial, antara lain menjamurnya pekerja pada sektor informal, pekerja pada *home industry*, sampai dengan kategori penduduk yang tidak melakukan kerja produktif apa pun (pengangguran terbuka).

Pekerjaan pada sektor informal dianggap sebagai alternatif di tengah

---

<sup>2</sup> Perbandingan data tahun 1975 dan 1993 (satuan rumah tangga) menunjukkan jumlah petani turun dari 48% ke 30% rmt dan buruh tani turun dari 12% ke 10%. Sebaliknya bukan-petani di desa naik dari 18% ke 22%, di mana jumlah golongan atas di antara bukan-petani menjadi lebih besar dari bukan-petani golongan rendah. Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, mayoritas dari mereka adalah angkatan kerja pada usia muda yang memiliki penilaian lebih kritis namun pragmatis terhadap potensi pengolahan pertanian di tengah situasi krisis.

kesulitan menemukan lapangan pekerjaan baru. Sebagai perbandingan, jumlah tenaga kerja di sektor formal menurun dari 37,9 persen di tahun 1996 menjadi 26,7 persen di tahun 2000 (Sekernas, dikutip dari Aloysius Gunadi Brata, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun II, No. 8 November 2003). Lebih lanjut, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2003, dari 88,1 juta penduduk yang bekerja, 64,4 persen di antaranya bekerja di sektor informal, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Namun, penghasilan pada lapangan ini relatif sama, atau di bawah pekerja sektor formal. Oleh karena itu, membengkaknya pekerja pada sektor informal sesungguhnya bukan karena "pilihan," namun tuntutan dari situasi ekonomi yang tidak memberikan alternatif yang lebih baik.<sup>3</sup>

Pergeseran-pergeseran kelas ini terjadi menyusul perubahan pada landasan ekonomi yang sedang berproses mundur, menuju kehancuran lebih lanjut. Perubahan tersebut terutama dalam rangka menyesuaikan landasan ekonomi Indonesia (dan negeri-negeri terbelakang lainnya) menurut kepentingan kekuatan korporasi-korporasi internasional di

negeri Barat. Liberalisasi pasar (mata uang dan komoditas), privatisasi, pemotongan anggaran sosial (demi pembayaran utang dalam dan luar negeri), adalah bentuk-bentuk kebijakan yang melemahkan landasan ekonomi nasional. Semakin waktu bergerak semakin terlihat dan terasa proses kehancuran tersebut. Pada tataran sosial, dampak yang dihasilkan antara lain berupa pergeseran-pergeseran kelas sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Perubahan pada bentuk (bukan esensi) dari pola hubungan kerja dapat ditemukan dalam industri-industri manufaktur besar, yang dikenal dengan istilah *outsourcing*, yang semakin melemahkan daya tawar kelas buruh di hadapan pemilik modal. Sistem *outsourcing* ini menciptakan lapisan kelas pengusaha perantara, yaitu kelas pengusaha yang dipercaya oleh pemesan di negeri-negeri kapitalis maju (dikenal juga dengan istilah *buyers* atau induk korporasi) untuk memberikan *order* produksi komoditas tertentu kepada industri pengolahan. Posisi dan peran mereka (pengusaha perantara) berbeda dari kelas pengusaha yang langsung mengolah kegiatan pro-

<sup>3</sup> Menurut hasil penelitian Edy Priyono (AKADEMIKA), pada tahun 1998 terdapat 19,7% pekerja yang tidak dibayar, atau naik 3,3 persen dibanding tahun 1997. Keseluruhan pekerja ini berada dalam kategori sektor informal.

duksi. Secara hierarkis, terdapat kelas kapitalis induk yang berada di luar negeri, kemudian kapitalis perantara yang menjadi pengatur pembagian *order* produksi, dan berikutnya kapitalis industri yang membeli tenaga kerja buruh untuk memproduksi *order*. Dengan demikian, kehadiran kapitalis perantara adalah penyematan satu tambahan mata rantai eksploitasi terhadap sebagian kelas buruh yang bekerja pada industri manufaktur. Tanggung jawab terhadap jaminan kerja kelas buruh juga menjadi tidak jelas, karena kelas pengusaha yang langsung berhadapan dengan buruh dapat menyalahkan pihak pengusaha perantara — yang tidak pernah diketahui oleh buruh — bila menemui suatu masalah. Kehadiran lapisan kapitalis perantara ini merupakan tuntutan dari kapitalis induk yang hanya berkepentingan pada efisiensi *cost* dan memperbesar laba, sehingga mengabaikan kebutuhan kesejahteraan kelas buruh.

Sistem *outsourcing* juga berdampak terhadap pekerja sektor informal yang mengerjakan produk yang dipesan kapitalis perantara. Salah satu alasan penting dari pengalihan *order* ini adalah karena biaya produksi yang relatif murah, termasuk biaya tenaga kerja, dibandingkan *cost* yang

harus dikeluarkan pada sektor formal. Dalam kondisi perlindungan terhadap pekerja sektor informal yang masih sangat lemah, tidak heran jika mereka menjadi korban eksploitasi yang tak kalah memprihatinkan.

Bagi sektor informal yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan *outsourcing*, mereka dipaksa bersaing — bila tidak diredam — oleh kekuatan kelas kapitalis besar. Karena kalah dalam faktor modal, kemampuan mengakses pasar, dan faktor modernisasi struktur dan infrastruktur produksi serta pemasaran, maka proses persaingan tersebut menjadi tidak seimbang. Ketimpangan dalam kompetisi ini menggambarkan dominasi kelas yang kuat, yakni korporasi besar, terhadap yang lemah (usaha mikro, kecil, dan menengah).

Dari paparan di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. Keberadaan kelas-kelas sosial pada lapisan bawah masih berada dalam ancaman krisis ekonomi dan represi politik, yang sewaktu-waktu dapat melempar mereka ke dalam situasi yang lebih sulit. Bentuk-bentuk ancaman ini semakin nyata dialami sehingga melahirkan resistensi, baik secara

- spontan maupun terorganisasi.
2. Kelas buruh dan kelas pekerja sektor informal menghadapi kontradiksi terbuka dalam lingkup mikro, yang menjadi prioritas penyelesaian dalam jangka pendek.
  3. Situasi rakyat pekerja saat ini ditentukan oleh korporasi-korporasi internasional. Dengan demikian, persamaan kepentingan antara kelas buruh dan kelas-kelas sosial lain adalah objektif.

Kesimpulan sementara di atas memiliki konsekuensi politis yang lebih jauh. Posisi dalam lapangan politik menjadi aspek yang penting karena di sini kepentingan-kepentingan riil dan hakiki dari semua kelas diperjuangkan. Dalam arena politik terjadi pertarungan untuk memperoleh kekuasaan, dan selanjutnya, dengan kekuasaan itu setiap kebijakan dapat diaplikasikan menurut kepentingan kelas yang menangani pertarungan tersebut.

Masalahnya adalah saat ini kita perlu mengukur pemahaman atau kesadaran politik kelas buruh dan kelas pekerja lain, yang menjadi panduan bagi tindakan pengorganisasian rakyat pekerja. Alat ukur untuk keperluan tersebut adalah penilaian terhadap tindakan-tindakan konkret dalam pergerakan, seperti: program,

perkembangan organisasi-organisasi, aksi-aksi, aliansi, bacaan dan diskusi teoretis, serta keseluruhan pengalaman berjuang. Namun, pada tataran konservatif, kesadaran politik juga ditentukan oleh perkembangan basis ekonomi-politik yang melingkupi mereka sehari-hari. Oleh karena itu, tinjauan terhadap potensi politik rakyat pekerja secara keseluruhan, termasuk pembangunan komunitas sebagai salah satu langkah penguatan politik, akan berangkat dari dua aspek, yaitu ekonomi dan politik.

### **Kelas Buruh dan Rakyat Pekerja: Sebuah Pengertian**

Sebelum memulai pembahasan, perlu kami kemukakan argumentasi mengapa pendekatan kelas-lah yang digunakan untuk menilai dinamika politik kelas buruh dan rakyat pekerja. Doug Lorimer dalam artikelnya "Kelas-Kelas Sosial dan Perjuangan Kelas" mengatakan:

*Di antara berbagai pengelompokan sosial yang ada, pengelompokan yang paling utama dan jelas adalah pengelompokan berbasis kelas. Pertama, kelas-kelas itu tumbuh dari fondasi-fondasi masyarakat yang paling mendasar, yaitu dari relasi masyarakat/manusia dengan alat-alat produksi yang menentukan relasi-*

*relasi lainnya. Kedua, kelas merupakan pengelompokan sosial yang paling kuat dan paling banyak keanggotaannya di tengah masyarakat, yang relasi-relasi serta perjuangannya amat mempengaruhi jalannya seluruh sejarah kehidupan sosial, politik, dan ideologi masyarakat.*

Pandangan marxian menempatkan produksi sosial sebagai syarat utama keberadaan ras manusia, disamping proses reproduksi. Dalam proses produksi tersebut, terjadi interaksi antara manusia dengan alam dan antara sesama manusia. Interaksi antara sesama manusia disebut hubungan sosial produksi. Kelas-kelas sosial muncul ketika hubungan sosial produksi antara manusia menjadi tidak setara akibat adanya kepemilikan/penguasaan pribadi terhadap alat produksi.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, kontradiksi antar-kelas menjadi catatan panjang sejarah masyarakat berkelas, teru-

tama antara kelas yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi dan kelas yang memiliki dan menguasai alat produksi. Kelas yang tidak memiliki alat produksi dipaksa oleh tuntutan kelanjutan hidup sehingga, secara sadar atau tidak sadar, menjalin suatu hubungan produksi yang tidak setara dan menjadi kelas yang tereksplotasi. Kontradiksi-kontradiksi antar-kelas ini melahirkan suatu susunan sosial baru dalam sejarah peradaban manusia.<sup>5</sup>

Masyarakat berkelas tempat terjalinnya hubungan kerja antara kelas pemilik alat kerja dengan yang tidak bermilik telah berlangsung selama ribuan tahun. Dalam era modern, karena kemampuan hegemonik kelas berkuasa melalui semua perangkat ideologinya, maka kondisi eksploitasi tersebut diterima (atau dipaksa untuk diterima) oleh mayoritas anggota masyarakat sebagai

---

4 Menurut Frederich Engels, terdapat tiga sebab adanya kepemilikan pribadi: 1) penimbunan kekayaan oleh kelompok/individu tertentu dalam masyarakat komunal, sehingga berhasil menguasai kelompok lain melalui jerat utang; 2) adanya penaklukan oleh suatu kelompok komune terhadap komune lain, kemudian yang takluk dijadikan budak; serta 3) dalam konteks asiatic, adanya pembagian/pemisahan kerja antara kerja produksi dengan kerja nonproduksi (administrasi dan organisasi). Bentuk kerja ini kemudian dikelompokkan, dan akhirnya terbentuklah kelompok yang menguasai ilmu pengetahuan, organisasi, dan administrasi yang kemudian bertransformasi menjadi kelas pemilik alat produksi.

5 Termasuk kelahiran kapitalisme merupakan buah kontradiksi antara kelas tuan tanah feodal, dengan kelas pengrajin/*artisan* serta kelas tani tak bertanah yang mulai bertransformasi menjadi kelas pekerja modern. Penemuan mesin uap juga merupakan jawaban atas tuntutan fase awal kapitalisme untuk meningkatkan jumlah produksi komoditas (penemuan mesin uap merupakan salah satu fase terpenting bagi perkembangan tenaga produktif kapitalisme), sehingga mampu mengakumulasi kekayaan jauh lebih besar dan lebih cepat dibanding kelas tuan tanah feodal.

sesuatu yang alamiah. Penerimaan terhadap hubungan kerja tersebut selanjutnya berdampak pada bentuk-bentuk hubungan yang lebih spesifik, yang dalam masyarakat modern diatur oleh negara melalui produk kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Negara tidak bertindak sebagai 'fasilitator' bagi kelas-kelas yang berkontradiksi. Dari perspektif kelas, negara memiliki sikap politik yang disesuaikan terhadap kepentingan kelas yang menguasainya.<sup>6</sup>

Kelas buruh lahir dalam sebuah fase perkembangan masyarakat dengan syarat-syarat perkembangan tenaga produktif dan hubungan produksi modern, yang disebut kapitalisme. Selain kelas buruh dan kelas kapitalis sebagai kelas fundamental, dalam sistem kapitalisme juga terdapat kelas-kelas sosial yang lain atau kelas non fundamental. Kelas-kelas sosial yang lain ini tidak berada dalam sebuah hubungan produksi langsung untuk memproduksi

komoditas dalam corak kapitalisme. Mereka berada dalam corak produksi prakapitalisme (terutama corak produksi feodalisme) atau kapitalisme tahap awal yang belum berkembang atau tidak berhasil dilumat oleh perkembangan kapitalisme.<sup>7</sup> Peran kelas-kelas sosial ini dalam rantai ekonomi kapitalisme adalah sebagai faktor pendukung, bila bukan sebagai faktor penghambat, dengan mengisi peran ekonomi yang belum dapat diisi oleh kapitalisme. Contoh kelas-kelas sosial tersebut adalah: petani dengan alat produksi sederhana dan lahan sempit, buruh tani, pekerja artisan (kerajinan), pekerja pada industri mikro dan kecil,<sup>8</sup> pedagang kecil atau pengecer, dan sebagainya.

Keberadaan penduduk yang bekerja pada sektor informal memang tidak mewakili satu kesatuan kelas sosial. Atau, dengan istilah lain, sektor informal tidak dapat didefinisikan sebagai satu kelas sosial tersendiri. Dalam suatu kegiatan ekonomi,

<sup>6</sup> V.I. Lenin, dalam bukunya (*The State and Revolution*) Negara dan Revolusi menyebutkan negara sebagai instrumen penindas dari kelas berkuasa.

<sup>7</sup> Dikenal dengan istilah *uneven development of capitalism*, atau perkembangan kapitalisme yang tidak seimbang, sebagai akibat pemaksaan penerapan (pencangkakan) sistem ekonomi kapitalis ke dalam masyarakat yang masih berada dalam fase feodalisme, atau melalui kolonialisme. Perkembangan berbeda terjadi di negeri-negeri Barat, yang perkembangan kapitalismenya lahir dari proses penghancuran terhadap corak produksi lama (feodalisme).

<sup>8</sup> Menurut kategori yang dibuat oleh Deperindag, jenis usaha dibagi ke dalam empat jenis, yaitu: usaha mikro dengan jumlah pekerja antara 2-5 orang, usaha kecil dengan jumlah 6-15 orang, usaha menengah 25-99, dan usaha besar dengan jumlah pekerja diatas 100 orang.

sektor ini bisa ditemukan dalam lapisan-lapisan kelas sosial yang berbeda, mulai dari pemilik usaha, pekerja yang diupah, dan pekerja yang tidak diupah. Dalam terminologi marxisme, komposisi sektor ini terdiri atas gabungan kelas semi-proletariat dan borjuis kecil.

Secara teoretis, kuantitas dan kualitas produktivitas kelas buruh dalam sistem kapitalisme melebihi kelas sosial lain, karena tenaga produktif (manusia, alat produksi, manajemen

kerja) memiliki kemampuan yang lebih unggul dibanding corak produksi masyarakat prakapitalis. Ini diperkuat oleh data pemerintah yang menyebutkan bahwa sejak tahun 1993 sumbangan sektor industri manufaktur dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah melampaui sektor pertanian (Lihat Tabel 1). Kelas sosial yang lain memiliki produktivitas tertentu dan turut memberikan andil dalam memenuhi kebutuhan sosial.

**Tabel 1**  
**PDB Indonesia Menurut Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri Berbagai Tahun**

PDB	1969	1974	1979	1984	1989	1993	1998	2000 (III)
-----	------	------	------	------	------	------	------	---------------

Sumber: BPS berbagai tahun

Terminologi rakyat pekerja lahir untuk membentuk kesatuan identitas pada kelas-kelas yang berbeda namun memiliki kontribusi kerja sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara ideologi dan politik, terminologi ini sekaligus memberikan batasan terhadap kelas sosial lain yang tidak memberikan kontribusi kerja sosial terhadap masyarakat. Kelas-kelas sosial ini secara tidak terhindarkan memiliki kontradiksi, namun kontradiksi tersebut tidak fundamental, atau hanya eksek dari situasi yang lebih mendasar, yakni eksploitasi kelas kapitalis besar.

Analisis kelas mendapatkan kesimpulan bahwa setiap tindakan atau pilihan politik dilandasi pada kepentingan kelasnya. Penolakan atas analisis dari perspektif ini kerap muncul dengan beberapa argumentasi. Pertama, tindakan atau pilihan politik dapat dilandasi oleh kesamaan faktor nonkelas (dalam pengertian marxisme), misalnya kesamaan etnis, gender, agama, dan lain sebagainya. Kedua, dalam perkembangan kapitalisme mutakhir, analisis dari perspektif kelas telah kehilangan konteks, karena kapitalisme mutakhir telah menghilangkan perbedaan kelas dengan munculnya

lapisan menengah dalam masyarakat kapitalis.

Selain salah secara substantif, argumentasi-argumentasi itu pun mengandung sejumlah kelemahan. Benar bahwa faktor nonkelas juga tampak menjadi alasan pilihan politik seseorang, tetapi alasan tersebut hanyalah penampakan dari sesuatu yang lebih esensi. Misalnya dalam kasus fasisme Hitler yang mengunggulkan ras Arya atas ras manusia lain di dunia. Perbedaan ras di sini adalah penampakan dari kepentingan kelas kapitalis Jerman yang membutuhkan penguasaan dan perluasan modal ke daratan Eropa dan negeri-negeri koloni. Kelas kapitalis Jerman berhasil memanipulasi kesadaran massa rakyat, termasuk rakyat pekerja, untuk mendukung kepentingan-kepentingan kelas penguasa. Penilaian serupa dapat diberlakukan pada kasus-kasus yang menampakkan sikap politik atas pengelompokan agama. Lahirnya fundamentalisme pada keyakinan religius adalah salah satu bentuk ekspresi politik yang tampak, yang sesungguhnya berakar pada kepentingan ekonomi-politik kelas yang menggerakkannya. Pernyataan ini dapat dibuktikan melalui pengusutan terhadap asal-usul konflik yang meng-

angkat sentimen agama. Dan sekali lagi, manipulasi terhadap kesadaran massa adalah cara yang paling efektif untuk menghasilkan dukungan dari masyarakat terhadap gagasan tertentu. Kekuatan analisis dari perspektif kelas adalah kemampuannya untuk menembus selubung-selubung yang menjadi pe-nampakan dari suatu gejala.

Berikutnya, perkembangan kapitalisme mutakhir sama sekali tidak menghilangkan keberadaan kelas sosial. Perkembangan kapitalisme hanya memberikan syarat-syarat baru dalam hubungan buruh upahan dan majikan, bahwa kelas kapitalis tidak lagi memiliki peran sosial dalam proses produksi, karena semua peran dalam produksi dan distribusi telah dilaksanakan oleh buruh upahan.<sup>9</sup>

### **Deindustrialisasi Nasional dan Posisi Kelas Buruh**

Pada tahun 1998 pertumbuhan industri nasional anjlok ke angka minus, (-)13,10% dibandingkan pada tahun 1996 yang mencapai

11,66%. Pada tahun-tahun selanjutnya belum terlihat pemulihan yang signifikan, bahkan kembali terancam oleh berbagai kebijakan makro ekonomi dari pemerintah, seperti pencabutan subsidi BBM. Berturut-turut selama tiga tahun terakhir 2001-2003 pertumbuhan sektor industri hanya mencapai 3,95%, 3,68%, dan pada tahun 2003 turun jadi 2,83%.<sup>10</sup>

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, perhitungan menunjukkan dalam periode 1988-1997, pertumbuhan tenaga kerja di sektor manufaktur rata-rata 7,1%. Daya serap ini mengalami penurunan drastis setelah krisis (1998-2002) menjadi rata-rata 1,9%. Bahkan, untuk tahun 2002, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur hanya 0,2%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tahun 2001 (3,8%). Persentase tersebut jelas tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja baru serta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik dan relokasi. Sebagai contoh, sejak tahun 2001 sampai bulan Juli 2002 jumlah buruh yang resmi diputuskan ter-PHK di sektor

---

<sup>9</sup> Dalam masyarakat kapitalis mutakhir, semakin sulit ditemukan keberadaan kelas kapitalis yang sekaligus berperan dalam proses produksi, misalnya pada posisi direktur. Sebagian besar kelas kapitalis memilih berada di luar struktur perusahaan dan menggunakan hasil akumulasi kapitalnya untuk dipertaruhkan dalam pasar saham atau mata uang.

<sup>10</sup> Sumber Data: Departemen Perindustrian.

TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) mencapai 33.894 orang. Sejalan dengan itu, asumsi penurunan yang sama dapat dikenakan pada sektor-sektor industri lain yang juga didera krisis, seperti industri perkayuan (termasuk mebel), industri baja, timah, dan beberapa sektor agrikultur.

Paparan di atas diperkuat oleh situasi investasi langsung yang sangat rendah. Investasi asing yang masuk, atau *foreign direct investment* (FDI), pada 1995 pernah membukukan angka US\$ 40 miliar, namun tahun lalu hanya mencapai US\$ 9,7 miliar. Untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), pernah mencapai puncaknya pada 1997 sebesar Rp 119,9 triliun. Tetapi sejak krisis melanda Indonesia, nilai persetujuan keduanya terus melorot sampai senilai Rp 25,3 triliun. Pertumbuhan investasi ini pun lebih didasarkan kepada gerak konsumsi, sehingga investasi baik domestik maupun asing memilih masuk ke sektor nonmanufaktur seperti jasa, perdagangan (pembangunan pusat-pusat perbelanjaan), dan properti. Berikutnya, penggunaan kapasitas produksi baru mencapai 70 persen dari kapasitas terpasang. Artinya, masih ada sekitar 30 persen lainnya yang menganggur

(*idle capacity*). Menurut survei Bank Dunia, dalam periode 1996-1998, kapasitas produksi korporasi di Indonesia mengalami penurunan 21%.

Penyebab utama dari gejala kehancuran industri ini adalah fundamen perekonomian nasional yang rapuh, karena berdiri di atas ketergantungan pada modal asing dan substitusi impor (lihat tabel 2) serta menyesuaikan jenis produk komoditas dengan kebutuhan pasar internasional, yang merupakan suatu bentuk ketergantungan lain, yakni ketergantungan pasar. Ketergantungan ini berakibat fatal ketika tuntutan negeri-negeri kapitalis Barat — tempat segala sesuatu bergantung — berubah, karena pola hubungan yang terjadi saat ini tidak lagi mencukupi akumulasi keuntungan di negeri mereka. Masalah substitusi impor terbentur merosotnya nilai mata uang nasional terhadap dolar AS, dan berikutnya masalah pemasaran berbenturan dengan persaingan produk negara-negara berkembang lainnya. Untuk kepentingan persaingan tersebut, setiap pemodal berusaha menekan cost serendah mungkin, termasuk labour cost, sehingga berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan buruh.

**Tabel 2**  
**Kandungan Impor Industri Indonesia Tahun 1994**

No	Sektor Industri	%
----	-----------------	---

Sumber: Sri Mulyani Indrawati dalam Rachbini, 2000

Sejumlah kebijakan makro ekonomi yang lain turut memberikan andil terhadap gejala deindustrialisasi ini, di antaranya adalah penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan setiap tahun serta liberalisasi perdagangan. Kenaikan harga BBM berdampak negatif terhadap sebagian besar industri, terutama yang menggunakan BBM sebagai salah satu bahan baku industrinya. Sementara itu liberalisasi perdagangan menghasilkan kompetisi yang tidak setara antara produsen dalam negeri yang kalah dalam hal modal dan teknologi — yang berpengaruh terhadap kompetisi harga komoditas — dibanding produsen asing.

Dampak-dampak dari kondisi di atas terhadap kelas buruh dan seluruh rakyat pekerja antara lain:

*Pertama*, terlihat jelas bahwa semakin banyak kelas pekerja yang kehilangan pekerjaan. Hal ini tidak sebatas kehilangan atas penghasilan untuk kelanjutan hidupnya, namun juga kehilangan hak untuk berkarya sebagai manusia yang produktif. Pada tahun 2002 Depnakertrans mendata sejumlah 114.933 buruh yang ter-PHK. Kemudian di tahun 2003 sedikit menurun menjadi 110.145 buruh. Jumlah tersebut tidak termasuk 30-50% perkara yang belum diputuskan oleh pihak P4P, namun telah diputuskan secara

sepihak oleh pihak perusahaan. Salah satu faktor penting yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya PHK adalah sistem *outsourcing* yang disahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 13 Tahun 2003. Sistem ini mengabaikan perlindungan terhadap jaminan pekerjaan. Buruh hanya dipekerjakan selama masih produktif dan bersaing dengan tenaga-tenaga lain. Apabila kemampuannya sudah melemah atau tidak memenuhi standar perusahaan, buruh akan dilempar dari *labour market*, tanpa pesangon dan tanpa pensiun.

*Kedua*, posisi tawar serta harga tenaga kerja kelas buruh menurun. Dalam kapitalisme, tenaga kerja dinilai sebagai salah satu jenis komoditas atau barang modal yang akan menghasilkan nilai baru bagi produk komoditas yang diciptakan. Dengan pasokan tenaga kerja yang jauh lebih besar dibanding permintaan, maka sesuai hukum pasar, harga tenaga kerja cenderung menurun. Tekanan terhadap upah secara langsung berpengaruh terhadap menurunnya daya beli. Tekanan terhadap daya beli berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi sehingga kelas kapitalis menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk menjangkau pasar pada tataran penghasilan yang

minim sekalipun. Misalnya, pemasaran komoditas dengan sistem kredit yang bersedia melepas barang tertentu dengan harga yang sangat murah, namun menekan pembeli melalui kewajiban pembayaran bulanan. Atau, dengan cara memecah suatu komoditas tertentu ke dalam kemasan yang lebih sederhana dan lebih kecil/sedikit untuk menjangkau target pasar yang berpenghasilan rendah.

*Ketiga*, tuntutan kompetisi industri mengharuskan adanya efisiensi produksi, termasuk *cost* untuk upah buruh. Meski nilai nominal mengalami kenaikan dalam beberapa tahun ini, upah riil terus menurun seiring meningkatnya harga barang kebutuhan. Dalam situasi kompetisi yang semakin sengit, perusahaan-perusahaan induk (*buyers*) hanya bersedia membeli produk dengan harga yang serendah mungkin, dan salah satu *cost* yang harus ditekan adalah upah buruh, di samping pajak, infrastruktur, dan lain-lain. Tuntutan persaingan juga meningkatkan eksploitasi terhadap buruh dalam hal peningkatan jumlah dan kecepatan produksi, yang berkonsekuensi pada jam kerja. Dalam beberapa kasus dapat ditemukan buruh yang melakukan kerja lembur sampai 24 jam sehari. Tuntutan kerja seperti ini

berdampak pada teralienasinya buruh dari lingkungan sosial dan terabaikannya hak berserikat dan berkumpul. Situasi ini juga menjadi kritik (atau bantahan) serius terhadap pandangan yang menyatakan bahwa produktivitas kelas buruh menurun, sementara *cost* yang dikeluarkan untuk upah meningkat, oleh salah satu lembaga penelitian ternama di negeri ini. Pernyataan tersebut cenderung menyalahkan kelas buruh karena menuntut perbaikan kondisi mereka, yang berdampak pada masalah ekonomi yang lebih luas, seperti penanam modal menjadi enggan untuk masuk, kemampuan industri/dunia usaha merekrut tenaga kerja baru menurun, dan pernyataan-pernyataan sejenis lainnya.

*Keempat*, dampak lebih luas adalah yang dialami oleh semua rakyat pekerja, kelas buruh, dan kelas pekerja lain. Deindustrialisasi berakibat menyempitnya lapangan para pencari kerja. Ketika gagal memperoleh pekerjaan dalam sektor formal,<sup>11</sup> karena peluangnya yang menyempit, para pencari kerja ini kemudian masuk ke sektor informal dan menunggu peluang selanjutnya

untuk memperoleh pekerjaan pada sektor formal. Sektor informal sendiri memiliki kerentanan dalam persaingan ekonomi yang semakin menajam. Argumentasinya adalah, pertama, banjir produk impor yang menjadi pesaing pada produsen sektor informal; kedua, persaingan memperebutkan pasar membawa dampak tingkat kejenuhan pasar semakin cepat mencapai puncaknya; ketiga, dengan penguasaan saham perbankan oleh asing, maka pemerintah — sekalipun memiliki komitmen memajukan sektor ini — tidak dapat mengontrol alokasi kredit untuk permodalan tersebut. Bank-bank yang telah dikuasai oleh asing akan lebih berkepentingan mengucurkan kredit bagi sektor yang memiliki kemampuan permodalan yang lebih tinggi, untuk menghindari risiko kredit macet. Karena kerentanan tersebut, perkembangan sektor informal cenderung mengalami nasib yang sama dengan sektor formal. Benar bahwa pertumbuhan sektor informal mengalami peningkatan jumlah unit kerja dalam dua tahun terakhir, namun situasi tersebut lebih menyerupai fenomena, yang sementara waktu dapat dimanfaatkan untuk mengisi kontribusi terhadap

---

<sup>11</sup> Pandangan umum masih mengasumsikan sektor formal lebih memberikan jaminan stabilnya tingkat penghasilan.

PDB yang menurun dari sektor formal.

### **Komunitas, Menemukan Kesatuan Kepentingan dalam Tekanan Krisis**

Masalah komunitas adalah masalah kesatuan penduduk pada teritori tertentu yang memiliki latar belakang kelas yang beragam. Pengorganisasian berdasarkan komunitas menuntut kemampuan untuk menemukan persamaan-persamaan dari kelas-kelas yang berbeda, untuk menghasilkan suatu kekuatan tertentu. Untuk menghindari kerancuan tafsir, maka istilah komunitas di sini perlu dibuat lebih spesifik, yakni komunitas yang terdiri atas kelas buruh industri, semi proletariat, dan borjuis kecil miskin. Kecuali pada industri agrikultur, yang umumnya melokalisasi pemukiman buruhnya di sekitar perkebunan, buruh pada sektor-sektor industri yang lain cenderung membaur ke dalam komunitas yang terdiri atas beragam kelas sosial. Dari segi lokasi, buruh industri lebih dekat ke daerah pinggiran kota, sedangkan buruh

jasa penyebarannya lebih merata.

Ada dua hal yang harus dijawab dalam mengorganisasikan komunitas, yang satu berkualifikasi prinsipil dan lainnya kualifikasi teknis. Hal yang prinsipil adalah menemukan kesamaan problem dan isu untuk dijadikan pembahasan bersama dalam komunitas, dan menemukan jalan keluar bersama. Sementara itu, hal teknis yang perlu dilakukan adalah menemukan metode pengorganisasian, bentuk organisasi komunitas, dan jenis aktivitas untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam satu komunitas.

Dalam komunitas-komunitas dengan pengertian yang spesifik seperti disebutkan di atas, isu kesejahteraan atau jaminan atas kesejahteraan adalah problem yang dirasakan merata dan mendesak oleh sebagian besar anggotanya.<sup>12</sup> Isu kesejahteraan tersebut kadang berangkat dari problem yang khusus dan spesifik, sehingga secara formal memberikan batasan-batasan untuk suatu perjuangan bersama. Sekalipun menurut logika ekonomi masalah-masalah yang tampak di permukaan tersebut

---

<sup>12</sup> Survei yang dilakukan Bank Dunia bekerja sama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik (September-Oktober 1998) menegaskan bahwa persoalan pengangguran, hilangnya penghasilan, serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok ditempatkan sebagai persoalan prioritas atau harus segera mendapatkan penyelesaian (Watterberg dkk., 1999).

bersumber pada penyebab yang sama, logika tersebut belum tentu dapat langsung dipahami oleh anggota komunitas. Misalnya, buruh yang menghadapi problem PHK dan pekerja konveksi yang menghadapi problem ketiadaan jaminan sosial. Masing-masing akan menganggap itu sebagai dua persoalan yang terpisah, sehingga cara penyelesaiannya pun dilakukan secara terpisah. Penjelasan terhadap suatu masalah yang belum dipahami oleh komunitas adalah penting, bahkan perlu terus ditingkatkan intensitasnya melalui berbagai kegiatan diskusi, bacaan, dan sebagainya. Namun, pada batas-batas tertentu, sebuah komunitas membutuhkan penyesuaian terhadap situasi kesadaran obyektif untuk menemukan sebuah kesepakatan atau tindakan bersama. Ketika identifikasi terhadap isu tersebut dilakukan, perlu dijelaskan kepentingan-kepentingan dari berbagai sektor terhadap isu yang diusung, baik kepentingan mendesak langsung ataupun kepentingan jangka panjang.

Cara menemukan aspek-aspek yang sama dalam suatu komunitas dapat dimulai dari diskusi-diskusi mengenai masalah yang dihadapi bersama. Umumnya, masalah bersama tersebut berhubungan dengan kebijakan

publik, yang tidak hanya berimbas pada sektor tertentu, namun menyebar merata. Misalnya kebijakan mengenai subsidi sosial (pendidikan dan kesehatan), subsidi BBM, masalah korupsi, sampai dengan masalah sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah-masalah teknis, dibutuhkan jawaban yang praktis. Jawaban praktis tersebut sulit untuk dikembangkan secara rinci dalam paparan ini, karena berhubungan dengan dinamika lapangan yang dapat berubah-ubah. Namun beberapa hal yang bersifat umum sekiranya dapat menjadi pegangan awal untuk bertindak, yaitu:

1. Hal waktu

Karena terdiri atas beragam kelas dan profesi, proses mengumpulkan dan membentuk organisasi komunitas mungkin akan menghadapi kesulitan dalam hal waktu untuk berkumpul. Masalah ini dapat disiasati antara lain dengan membuat pertemuan-pertemuan terpisah, yang pengelompokannya berdasarkan kesiapan setiap individu meluangkan waktu, atau tidak berdasarkan sektoral. Pertemuan-pertemuan terpisah tersebut akan disatukan pada saat tertentu ketika seluruh

komunitas atau perwakilan komunitas diminta meluangkan waktu bersama.

## 2. Hal organisasi

Selain mencakup teritorial, pengorganisasian menurut komunitas juga bersifat multi-sektoral. Karena itu, penggunaan alat berupa organisasi sektoral (seperti serikat buruh) mungkin menjadi tidak sesuai. Rumusan konsepsi organisasi setidaknya perlu memperhatikan kriteria-kriteria berikut: a) mampu menjangkau semua lapisan rakyat pekerja; b) mampu mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota ke dalam kegiatan-kegiatannya; c) mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah kolektif yang dihadapi oleh anggota, atau bila perlu sampai menyelesaikan masalah yang bersifat pribadi; d) mampu memfasilitasi kebutuhan anggota akan ilmu pengetahuan dan pengembangan kapasitas kolektif.

## 3. Jenis dan bentuk kegiatan

Jenis dan bentuk kegiatan sedapat mungkin melibatkan sebanyak-banyaknya anggota, karena setiap kegiatan positif akan sangat berguna bagi kemajuan kesadaran dan solidaritas anggota. Bentuk-bentuk yang lebih spesifik adalah keputusan ang-

gota yang dilihat berdasarkan kebutuhan komunitas setempat.

## Penutup

Pengalaman perjuangan sejak tahun 1998 adalah modal penting bagi perjuangan kelas buruh ke depan. Persatuan dan pembaruan ke dalam komunitas merupakan sebuah langkah politik untuk menguatkan posisi kelas buruh, sekaligus memberikan dan mendapatkan dukungan dalam perjuangan pada lingkup yang lebih khusus. Bagi kelas pekerja lain yang belum terbiasa berjuang melalui organisasi tertentu, kesempatan ini adalah peluang mengembangkan kapasitas politik.

Perkembangan ekonomi-politik, sejauh tidak ada perubahan yang fundamental dari pemerintah, akan menghasilkan sejumlah masalah sosial baru yang harus dihadapi oleh rakyat pekerja secara keseluruhan. Mengorganisasikan masyarakat dalam komunitas adalah salah satu langkah antisipasi dan penguatan dalam menghadapi masalah tersebut. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa selain melampaui batas sektoral dalam teritori tertentu, pengorganisasian komunitas rakyat pekerja juga perlu diperluas dalam suatu jaringan dan

koordinasi. Ini setidaknya tindakan yang dapat dilakukan oleh rakyat pekerja.

**Daftar Istilah:**

1. **Proletariat:** Kelas sosial yang tidak memiliki alat produksi sendiri sehingga harus menjual tenaga kerjanya kepada kelas pemilik alat produksi, dalam corak produksi masyarakat kapitalis. Produksi kapitalis mensyaratkan aspek perkembangan teknologi dan manajemen pada kualifikasi tertentu sehingga tidak seluruh kelas sosial yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja untuk kelas pemilik alat produksi dapat disebut proletariat.
2. **Semi Proletariat:** golongan kelas sosial yang tidak memiliki alat produksi sendiri, sehingga bekerja dan menerima upah dari suatu hubungan produksi dalam corak produksi prakapitalisme atau kapitalisme tahap awal. Kelas ini umumnya berproses menjadi kelas proletariat.
3. **Borjuis kecil:** kelas sosial yang memiliki alat produksi sendiri dan terlibat dalam kerja produksi. Dalam perkembangan kapitalisme, kelas ini cenderung berproses menjadi kelas borjuis.
4. **Kelas fundamental:** adalah kelas-kelas yang dilahirkan dari corak produksi yang berlaku, atau kelas-kelas yang tidak mungkin kita temukan di bawah corak produksi tertentu/lainnya. Kontradiksi mendasar dari corak produksi yang berlaku terwujud dalam pola hubungan dan pola perjuangan antarkelas. *Semua corak produksi yang antagonistik bisa ditunjukkan dengan adanya dua kelas yang secara fundamental saling bertentangan.*
5. **Tenaga produksi:** tenaga produksi adalah gabungan antara faktor-faktor produksi (termasuk alat produksi) dengan tenaga kerja manusia yang menggerakkannya. Tenaga produksi merupakan elemen yang paling *mobile* dalam masyarakat. Mereka terus-menerus berubah sebab manusia terus-menerus meningkatkan alat-alat kerja (teknologi) dan mengumpulkan pengalaman-pengalaman dalam memproduksi.
6. **Corak produksi:** suatu kesatuan antara tenaga produksi dan hubungan produksi yang mencirikan cara dan karakter produksi masyarakat pada fase tertentu. Misalnya, fase masyarakat kapitalisme memiliki corak produksi berupa: 1) hubungan produksi antara kelas buruh dan kelas kapitalis; 2) menggunakan tenaga

produksi yang modern, dengan penggunaan teknologi serta

kapasitas manusia yang menggunakan alat produksi tersebut.

### **Daftar Rujukan**

- Edy Priyono. 2000. "Mengapa Angka Pengangguran Rendah di Masa Krisis? Menguak Peran Sektor Informal sebagai Buffer Perekonomian" <<http://akademika.or.id/arsip/Pengangguran-Edy.pdf>> (19 September 2005).
- Frederich Engels. 2004. *Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Kompas. 2004. 'Sektor Manufaktur Mulai Menyerap Tenaga Kerja dari Sektor Pertanian'. 16 Juni.
- Lourimer, Doug. 2000. "Kelas-Kelas Sosial dan Perjuangan Kelas." *Jurnal Kiri Tahun 1 Nomor 1*: 4-42.
- M. Khusaini. 2001. "Refleksi Perjalanan Ekonomi Indonesia (Tinjauan Kritis atas Fundamental Ekonomi)." *Lintasan Ekonomi Volume XVIII Nomor 1*, Januari 2001 : 40-47.